

**PENGARUH FAKTOR KEPRILAKUAN ORGANISASI TERHADAP
KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sula)**

Burhan Zakaria
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Email: Zakariaburhan7@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Dimana pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang disebar secara langsung kepada pegawai yang berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukungan atasan bernilai positif sebesar 3,603 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan tujuan bernilai positif sebesar 7,421 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif kejelasan tujuan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, pelatihan bernilai positif sebesar 1,056 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,035 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan tidak berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula.

Kata Kunci: Keprilakuan Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dukungan Atasan

ABSTRACT

The research objective used in this study was to use a questionnaire. Where data collection is done through a survey method using a questionnaire. Questionnaires distributed directly to employees in the Regional Financial and Asset Management Revenue Service (DPPKAD) of the Sula Islands Regency.

Based on the results of this study, it shows that superior support has a positive value of 3.603 with a significance level of 0.001, less than $\alpha = 0.05$. So it can be concluded that there is a positive influence of superior support on the regional financial accounting system, clarity of goals is positive at 7.421 with a significance level of 0.000 less than $\alpha = 0.05$. So it can be concluded that there is a positive effect of clarity of purpose on the regional financial accounting system, training has a positive value of 1.056 with a significance level of 0.035 greater than $\alpha = 0.05$. So it can be concluded that the training has no effect on the regional financial accounting system at the Regional Financial and Asset Management Revenue Service (DPPKAD) of the Sula Islands Regency.

Key Word: Organizational Behavior, Regional Financial Accounting System, Superior Support

PENDAHULUAN

Negara mempunyai suatu Pemerintahan yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan, dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu wewenang yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri adalah bidang keuangan daerah. Pengurus keuangan ini diantaranya adalah penyelenggaraan penyusunan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, (Halim, 2012).

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran yang cerdas melalui inovasi sistem akuntansi keuangan Daerah, (Bastian, 2006).

Pemerintah selalu mengintensifkan langkah-langkah pengelolaan keuangan daerah dengan baik dalam upaya untuk mencapai *Good Government Governance*. Langkah yang dilakukan berbagai Peraturan dan Undang-Undang. Pemerintah terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah menterjemahkan tanggungjawab atas keuangan yang dikelolanya dalam bentuk penyampaian laporan keuangan.

Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah Daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi (Sri Dewi Wahyundaru, 2001). Oleh karena itu, diperlukan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baru untuk menggantikan sistem lama yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah diterapkan sejak 1981. Sistem MAKUDA tersebut sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang saat ini (Sri Dewi Wahyundaru, 2001).

Bastari (2006) mengemukakan sistem lama (MAKUDA) dengan ciri-ciri antara lain *single entry* (pembukuan tunggal), *incremental budgeting* (penganggaran secara tradisional yang rutin dan pembangunan) dan pendekatan anggaran berimbang dinamis sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan daerah, karena beberapa alasan yaitu tidak mampu memberikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah, atau dengan kata lain dapat memberikan laporan neraca, tidak mampu memberikan informasi mengenai laporan aliran kas sehingga manajemen atau publik tidak dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan adanya kenaikan atau penurunan kas daerah, sistem yang lama (MAKUDA) ini juga tidak dapat membantu daerah untuk menyusun laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis kinerja sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000.

Undang-undang tentang Perimbangan Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Oleh karena itu, sistem akuntansi menjadi tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap Pemerintah Daerah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal. Pemerintah Daerah selaku pengelola dan publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat di percaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal. Dalam rangka menetapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk mengembangkan sistem (Halim, 2012).

Keperilakuan organisasi pada hakekatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri, yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Dengan demikian, kerangka dasar teori perilaku organisasi ini didukung oleh dua komponen pokok, yakni individu-individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku tersebut. Jadi, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek – aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu (Mahmudi, 2010).

Aspek pertama meliputi pengaruh organisasi terhadap manusia, sedang aspek kedua pengaruh manusia terhadap organisasi. Pengertian ini sesuai dengan rumusan Kelly dalam bukunya *Organizational Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku organisasi di dalamnya terdapat interaksi dan hubungan antara organisasi di satu pihak dan perilaku individu di lain pihak. Kesemuanya ini memiliki tujuan praktis yaitu untuk mengarahkan perilaku manusia itu kepada upaya-upaya pencapaian tujuan, keprilakuan organisasi sesungguhnya terbentuk dari perilaku-perilaku individu atau kelompok yang terdapat dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, masalah perilaku organisasi jelas akan meliputi atau menyangkut pembahasan mengenai perilaku individu atau kelompok meskipun faktor eksternal ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya, namun tidak akan dibahas dalam konteks ilmu perilaku organisasi, (Adelia dan Supriadi, 2013).

Berdasarkan fenomena awal yang penulis dapat di lapangan permasalahan yang terdapat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula mengenai faktor keprilakuan adalah kurangnya dukungan atasan yang menyebabkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah kurang maksimal sedangkan kejelasan tujuan digunakannya sistem akuntansi keuangan Daerah sudah ditentukan dan juga sudah banyak pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan Daerah.

LANDASAN TEORI

Pengertian Faktor Keprilaku Organisasi

Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Ia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi (Thoha, 2010). Menurut Nurlela dan Rahmawati (2010), faktor organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Dukungan Atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Kejelasan tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya sistem akuntansi keuangan daerah di semua level organisasi, dan pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem.

Thoha (2010) mengidentifikasi *public choice theory*, teori agensi dan *transactional cost economics* sebagai paradigma yang dominan ketika siap untuk mereformasi pemerintah: *public choice theory* menganggap semua tingkah laku manusia didominasi oleh kepentingan pribadi. *Public Choice* diaplikasikan sebagai usaha untuk peran pemerintah, meningkatkan transparansi dan lain-lain. Teori Agensi dengan asumsi peningkatan kepentingan pribadi yang menyebabkan konflik antara principal dan kontraktual untuk mengatasi masalah moral hazard dan *asimetri informasi*, *transactional cost economic* berfokus pada struktur.

Dukungan Atasan

Menurut Latifah (2007), dukungan atasan dapat diartikan sebagai keterlibatan atasan dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Dukungan manajemen puncak dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Atasan dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam mewujudkan efektivitas suatu sistem.

Ciri-ciri atasan yang baik dapat memberikan dukungan kepada karyawannya dalam suatu organisasi adalah:

1. Mempunyai kemampuan melebihi orang lain dan harus mempunyai inisiatif untuk memberikan masukan yang baik kepada karyawannya.
2. Mempunyai rasa tanggungjawab yang besar.
3. bekerja keras sehingga dapat memberikan contoh atau motivasi kepada karyawan/pegawai.
4. Pandai bergaul dan dapat mengenal semua karyawan dengan baik.
5. Memberikan contoh bekerja dan semangat kepada bawahan atau karyawan.
6. Memiliki rasa integritas dan rasa bersatu padu dengan kelompok yang ada dalam organisasi.

Manajemen puncak memegang peranan penting dalam setiap tahap siklus pengembangan sistem implementasi. Dukungan manajemen puncak meliputi penyusunan sasaran dan penilaian tujuan, mengevaluasi usulan proyek pengembangan sistem informasi, mendefinisikan informasi dan pemrosesan yang dibutuhkan, melakukan *review* program dan rencana pengembangan sistem informasi.

Menurut Ikhsan (2005), dukungan manajemen puncak/atasan merupakan suatu faktor penting yang menentukan efektifitas penerimaan sistem informasi dalam organisasi. Beberapa alasan mengapa keterlibatan manajemen puncak dalam pengembangan sistem merupakan hal yang penting, yaitu: Pengembangan sistem merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan. Manajemen puncak (atasan) mengetahui rencana sehingga sistem yang dikembangkan seharusnya sesuai dengan rencana dan dengan demikian sistem yang baru akan mendorong tercapainya tujuan. Manajemen puncak memegang peranan penting dalam setiap tahap siklus pengembangan sistem implementasi. Dukungan manajemen puncak meliputi penyusunan sasaran dan penilaian tujuan, mengevaluasi usulan proyek pengembangan sistem informasi, mendefinisikan informasi dan pemrosesan yang dibutuhkan, melakukan *review* program dan rencana pengembangan sistem informasi.

Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan didefinisikan suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selain itu kejelasan tujuan dapat dijelaskan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya sistem akuntansi keuangan daerah di semua level organisasi selain dan dapat diartikan suatu keadaan yang jelas terhadap arah yang dapat menentukan suatu keberhasilan system dan target yang dituju (Latifah, 2007). Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi dapat menentukan suatu keberhasilan sistem, karena individu dengan suatu kejelasan tujuan akan lebih dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai target untuk mencapai tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki.

Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi dapat menentukan suatu keberhasilan sistem, karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, akan lebih dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai target untuk mencapai tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki. Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan dari anggota organisasi yang dominan, yang secara kolektif mempunyai kendali yang mencukupi atas sumber daya organisasi untuk membuat komitmen atas arah tertentu. Tujuan dipandang sebagai suatu kesepakatan yang kompleks, yang kadang kala mencerminkan kebutuhan individual dan tujuan pribadi yang saling bertentangan dari anggota organisasi yang dominan (Latifah, 2007).

Pelatihan

Menurut Janiwarti (2005), pelatihan merupakan suatu proses sistematis untuk mengubah perilaku, pengetahuan dan motivasi dari karyawan saat ini, untuk meningkatkan kesesuaian antara karakteristik karyawan dan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh pekerjaan. Pelatihan adalah kegiatan dari manajemen sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan prestasi kerja karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu. Secara umum tujuan suatu pelatihan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan serta untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan serta sikap karyawan yang ada dan diharapkan baik

pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun kebutuhan daerah.

Pelatihan ditunjukkan kepada semua karyawan, baik karyawan lama ataupun karyawan baru, bagi karyawan baru pelatihan dilakukan guna meningkatkan wawasan karyawan untuk dapat mengerti pengoperasian peralatan atau mesin, kepada siapa mereka bertanggungjawab, dan bagaimana cara mengatasi konflik dalam organisasi, sedangkan bagi karyawan lama gunanya untuk lebih meningkatkan hasil pekerjaan baik sekarang atau yang akan datang, serta dapat memperbaiki efisiensi dan efektifitas kerja karyawan untuk mencapai tujuannya (Chenhall, 2004). Efisiensi dan efektifitas karyawan dapat dicapai dengan meningkatkan:

1. Pengetahuan karyawan
2. Keahlian karyawan
3. Sikap karyawan terhadap tugas-tugasnya.

Untuk mencapai program pelatihan, maka yang harus diperhatikan adalah:

- a) Mempunyai sasaran yang jelas dan memakai tolak ukur terhadap hasil yang dicapai.
- b) Diberikan oleh tenaga pengajar yang mampu menyampaikan ilmunya serta mampu memotivasi peserta pelatihan.
- c) Materi disampaikan secara mendalam sehingga mampu merubah sikap dan meningkatkan prestasi karyawan.
- d) Menggunakan metode-metode yang tepat guna, misalnya diskusi untuk satu sasaran tertentu.
- e) Materi sesuai dengan latar belakang teknis, permasalahan dan daya tangkap peserta.
- f) Meningkatkan keterlibatan aktif peserta sehingga mereka bukan sebagai pendengar saja.
- g) Disertai dengan metode penilaian sejauh mana sasaran program pelatihan dapat tercapai.

Pelatihan bagi pemakai merupakan faktor yang penting dalam menentukan efektivitas penerimaan sistem informasi dan dalam proses pengembangan sistem. Jika tidak adanya pelatihan, maka akan berdampak pada hilangnya kekuasaan pemakai jika tenaga kerja dikurangi berkaitan dengan tidak adanya kemampuan pemakai dalam penggunaan sistem dan komputerisasi, dan ini berakibat sistem tidak bisa dilaksanakan dan tujuan instansi sulit untuk dicapai.

Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang terdiri atas kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah *input* (masukan) menjadi *output* (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. *Output*-nya adalah laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau

kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), (Hendriksen: 2005).

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri terdapat dalam Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002, tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi: "Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu system akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi".

Tahap-tahap dalam siklus akuntansi dimulai dari bukti-bukti transaksi, jurnal, posting ke buku besar, membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo membuat laporan keuangan, jurnal penutupan, dan neraca setelah penutupan, Laporan Keuangan, sesuai dengan siklus akuntansi, setelah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian disusun laporan-laporan keuangan dengan mengambil data neraca saldo setelah penyesuaian maka dibuatlah: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam pasal 239 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dengan mengacu pada SAP.

Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menyebutkan bahwa tujuan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi *doubleentry* melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan itu sendiri.

Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, prosedur akuntansi sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan

dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

3. Prosedur Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

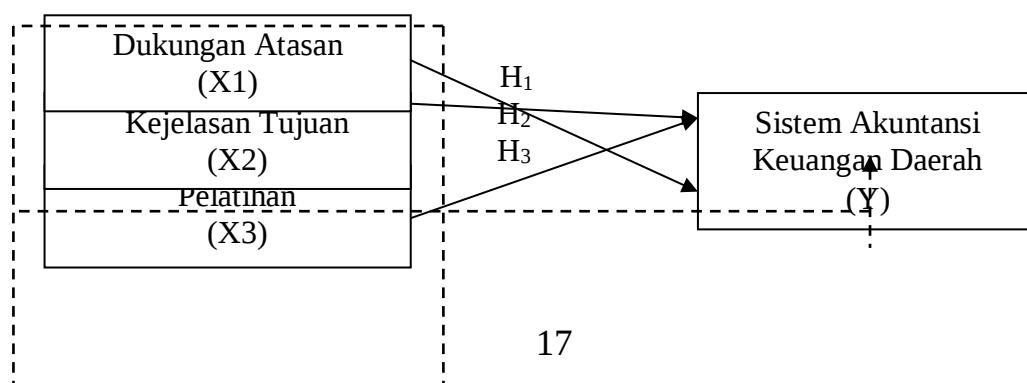
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berguna untuk mengelola Dana secara transparan, ekonomis, efektif efisien, dan akuntabel. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Nurlela (2010) adalah sebagai berikut:

1. *Validity*, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi.
2. *Reability*, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya.
3. *Efisien*, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya.
4. *Efektif*, melalui sistem akuntansi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal.

Kerangka Konsep

Kerangka konseptual ini dimaksudkan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Gambar Kerangka Konsep



Ket : -----► : Simultan

—————► : Parsial

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh Pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Sula, yang berjumlah 32 orang. Menurut Sugiyono (2016: 118) karena jumlah populasi relatif kecil yaitu tidak lebih dari 100 orang maka semua populasi dijadikan sampel, teknik ini disebut sampel jenuh. Sedangkan Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel atas dasar pertimbangan. Penentuan jumlah sampel berupa Kuesioner sebanyak 32 yang didistribusikan secara merata. Kriteria Sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Sula, yang terdiri dari (1) Kepala Bidang, (2) bendahara, (3) Kepala Seksi dan (4) anggota.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang di dapat dari nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian dan tidak melalui media perantara.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan pada penelitian ini, menggunakan data primer, sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Dimana pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang disebarakan secara langsung kepada pegawai yang berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula.

Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdapat dua klasifikasi, antara lain variabel independen (bebas) yang terdiri dari dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan. Sedangkan variabel dependen (terikat) terdiri dari sistem akuntansi keuangan daerah. Berikut ini definisi operasional dari masing-masing variabel:

Dukungan Atasan (X_1)

Dukungan atasan diartikan juga berpengaruh dalam mendukung suksesnya implementasi sistem baru dan mengembangkan daya inovatif bawahannya. Sebagai

keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan.

Kejelasan Tujuan (X₂)

Kejelasan tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi. Kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki.

Pelatihan (X₃)

Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem. Pelatihan bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai ketrampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkayan proses ataupun prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan erta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y	= Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
α	= Konstanta
β	= Koefisien regresi
X ₁	= Dukungan Atasan (DA)
X ₂	= Kejelasan Tujuan (KT)
X ₃	= Pelatihan
ϵ	= Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian, maka peneliti menggunakan tabel statistik deskriptif berikut:

Tabel Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dukungan Atasan (X1)	32	32	45	39.19	4.020
Kejelasan Tujuan (X2)	32	25	39	32.88	3.220
Pelatihan (X3)	32	25	44	36.66	4.981
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)	32	29	69	50.28	10.795
Valid N (listwise)	32				

Sumber: Hasil Olah Peneliti

Dari tabel tersebut berdasarkan jawaban dari sampel N = 32 responden, maka menghasilkan pengukuran variabel dukungan atasan (X1) dengan nilai minimum 32, nilai maksimum 45, mean 39,19 dan *Std. Deviation* 4,020. Hasil Pengukuran variabel kejelasan tujuan (X2) dengan nilai minimum 25, nilai maksimum 39, mean 32,88 dan *Std. Deviation* 3,220. Hasil pengukuran variabel Pelatihan (X3) dengan nilai minimum 25, nilai maksimum 44, mean 36,66 dan *Std. Deviation* 4,981. Hasil pengukuran variabel sistem akuntansi keuangan daerah (Y) memiliki nilai minimum 29, nilai maksimum 69, mean 50.28 dan *Std. Deviation* 10.795. Berdasarkan hasil analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa nilai variabel yang paling tinggi (maximum) adalah variabel sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan variabel yang paling rendah (minimum) adalah dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan.

Uji Regresi Berganda

Koefisien variabel-variabel analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel Regresi Linier Berganda

Model	B	t	Sig.
(Constant)	14.538	16.214	.832
Dukungan Atasan (X1)	.329	3.603	.001
Kejelasan Tujuan (X2)	.368	7.421	.000
Pelatihan (X3)	.266	1.056	.035

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 14,538 + 0,329 + 0,368 + 0.266 + \epsilon$$

Dari persamaan regresi tersebut, terlihat bagaimana pengaruh dukungan atasan (X1), kejelasan tujuan (X2), pelatihan (X3) terhadap sistem akuntansi keuangan Daerah

(Y). Hasil di atas memberikan pemahaman bahwa jika tidak terjadi peningkatan dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan, maka besarnya sistem akuntansi keuangan Daerah di prediksi sebesar 14,538 berdasarkan nilai konstanta (a) selanjutnya nilai koefisien regresi dukungan atasan (b_1) = 0,329 menunjukkan bahwa setiap penurunan/penambahan satu satuan sistem akuntansi keuangan Daerah maka akan meningkatkan/menurunkan sistem akuntansi keuangan Daerah sebesar 0,329 satuan, nilai koefisien regresi kejelasan tujuan (b_2) = 0,368 menunjukkan bahwa setiap penambahan/penurunan satu satuan sistem akuntansi keuangan Daerah maka akan meningkatkan/menurunkan kejelasan tujuan sebesar 0,368 satuan dan nilai koefisien regresi pelatihan (b_3) = 0,566 menunjukkan bahwa setiap penambahan/penurunan satu satuan sistem akuntansi keuangan Daerah maka akan meningkatkan/menurunkan pelatihan sebesar 0,566 satuan.

Pengaruh Dukungan Atasan terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Hipotesis H_1 menyatakan bahwa ada pengaruh positif dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil uji t menunjukkan bahwa dukungan atasan bernilai positif sebesar 3,603 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa dukungan atasan berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga H_1 diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi atasan memberikan dukungan kepada para pegawainya maka para pegawai akan memanfaatkan atau menggunakan SAKD dengan semakin baik pula.

Pengaruh Kejelasan Tujuan terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Hipotesis H_2 menyatakan bahwa ada pengaruh positif kejelasan tujuan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil uji t menunjukkan bahwa kejelasan tujuan bernilai positif sebesar 7,421 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif kejelasan tujuan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga H_2 diterima. Artinya ada pengaruh signifikan kejelasan tujuan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Hal ini berarti semakin tinggi kejelasan tujuan penggunaan suatu sistem demi kelancaran para pegawai dalam bekerja maka semakin tinggi pemanfaatan/kegunaan SAKD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Pengaruh Pelatihan terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Hipotesis H_3 menyatakan bahwa ada pengaruh positif pelatihan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil uji t menunjukkan bahwa pelatihan bernilai positif sebesar 1,056 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,035 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga H_3 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh pelatihan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil ini membuktikan bahwa pelatihan yang diberikan kepada pegawai pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula semakin baik namun pegawai tidak mengaplikasikan apa yang didapat dalam pelatihan tersebut. Artinya bahwa pelatihan sebagai salah satu faktor organisasional berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sehingga dapat diartikan bahwa para pegawai kurang memberikan

persepsi bahwa kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) lebih dipengaruhi oleh faktor organisasional khususnya faktor pelatihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dukungan atasan secara parsial berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiannya Kayati (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Kejelasan tujuan secara parsial berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiannya Kayati (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kejelasan tujuan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
3. Pelatihan secara parsial tidak berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitiannya Kayati (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pelatihan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiel Janitra, 2015. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Dppkad Subosukawonosraten). *Skripsi*; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ahmad Nur Solichin. 2015. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. *Skripsi*; Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Adelia dan Supriadi. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (survey pada Pemda di Jawa Tengah)". *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Bastian Indra. 2006, *Sistem Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.
- Bodnar, G.H dan William S., Hopwood. 2013. *Accounting Information System*. Prentice Hall International. 6th. Ed.

- Chenhall, R.H. 2004. *The Role of Cognitif and Affective Conflict in Early Implementation of Activity-Based Cost Management. Behavioral Reaserch in Accounting* 16:
- Dessler Garry. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Indonesia. Erlangga : Jakarta
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Halim, Abdul, 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keungan Daerah*, Edisi Ketiga, Jakarta : Salemba Empat.
- Hamid, Abdul, 2007. *Panduan Penulisan Skripsi*. FEIS UIN Press, Jakarta.
- Hendriksen, M.C. dan B.M.F. Van.2005, *Accounting Theory*, Ed. New Jersey; Person Education, Inc.
- Husein Umar. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi 2. BPFE. Yogyakarta.
- Ikhsan, Arfan dan M. Ishak. 2005. *Akuntansi Keperilakuan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Janiwarti. 2005. *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kayati. 2016. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Skripsi*; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- Laminja dan Azhar S., 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Aceh, *Thesis*. Universitas Sumatra Utara.
- Latifah, Lyna dan Sabeni Arifin. 2007. Faktor Keperilakuan Organisasi dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Jurnal SNA X*: Universitas Diponegoro
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No.1, Hal 1-17.
- Mranani, Muji dan Lestiorini Beti. 2011. Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Konflik Kognitif dan

Konflik Afektif sebagai *Intervening*. *Fokus Ekonomi (FE)*, Desember 2011, Hal.193 – 203 Vol.10, No.3

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Nurlela dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Faktor keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah : Kerangka Standard dan Metode*, Aksara Satu Surabaya.

Romney and Stenhardt. 2006. *Behavioral Model for Implementing Cost Management Sistem*, *Journal of Cost Management* (Winter), 17:25

Robert, K. and Vijay. 2005. *The Implementation stages of activity based costing and the impact of contextual and organizational factors*, *Journal of Management Accounting Research* 10

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sri Dewi Wahyundaru. 2001. *Akuntansi Sektor Publik dalam Otonomi Daerah*. Bandung. Suara Merdeka.

Thoha. 2010. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT Indeks

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.